



Pemerintah  
Provinsi Kepulauan Riau

# RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2026

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, sebagai penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan pembangunan dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2026, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka merencanakan pembangunan daerah guna mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya. Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di BKAD Provinsi Kepulauan Riau, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Tanjungpinang, 03 Januari 2026

**Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Kepulauan Riau**



**YENNI MITTARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.**  
Pembona Utama Muda  
NIP. 19680528 199803 2 004

DAFTAR ISI

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR.....                                                | i   |
| DAFTAR ISI.....                                                    | ii  |
| DAFTAR TABEL .....                                                 | iii |
| BAB I    PENDAHULUAN .....                                         |     |
| A. Latar Belakang.....                                             | 1   |
| B. Dasar Hukum.....                                                | 2   |
| C. Maksud dan Tujuan .....                                         | 4   |
| D. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi .....               | 4   |
| BAB II   RENCANA STRATEGIS .....                                   | 14  |
| A. Visi dan Misi .....                                             | 14  |
| B. Tujuan dan Sasaran.....                                         | 15  |
| BAB III RENCANA KERJA TAHUNAN .....                                | 18  |
| A. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan dan Aset Daerah..... | 18  |
| B. Sasaran Strategis.....                                          | 18  |
| BAB IV   PENUTUP .....                                             | 40  |

**DAFTAR TABEL**

|             |                                                                                                                                                                                        |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel II-1  | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Keuangan<br>dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 .....                                                           | 17 |
| Tabel III-1 | Rencana Kerja Tahunan 2026 .....                                                                                                                                                       | 19 |
| Tabel III-2 | Program, Sub Kegiatan dan Indikator Badan Keuangan dan<br>Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 Berdasarkan<br>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 ..... | 20 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan dokumen yang berisi rencana pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Dokumen ini juga merupakan wujud pertanggungjawaban Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai unsur penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di Bidang Keuangan di Provinsi Kepulauan Riau.

RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam RPJMD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai di lingkungan BKAD Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kegiatannya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, dan Tujuan BKAD Provinsi Kepulauan Riau, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 bagi Kepala BKAD Provinsi

Kepulauan Riau kepada Gubernur. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi BKAD Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

## **B. Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi Rencana Kinerja Tahunan BKAD Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
16. Perda nomor 6 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 tgl 31 Desember 2025 Nomor register 6-309/2025 Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6;
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 733) sebagaimana telah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan);
18. Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 894);



19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);
20. Pergub nomor 63 Tahun 2025 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 (Berita daerah Tahun 2025 Nomor 1083).

### **C. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) *Badan* Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaksanaan Kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun evaluasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan *dan* Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 adalah:

1. Sebagai dokumen dasar dalam mengevaluasi keberhasilan pencapaian program dan kegiatan tahun 2026.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

### **D. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **1. Struktur Organisasi**

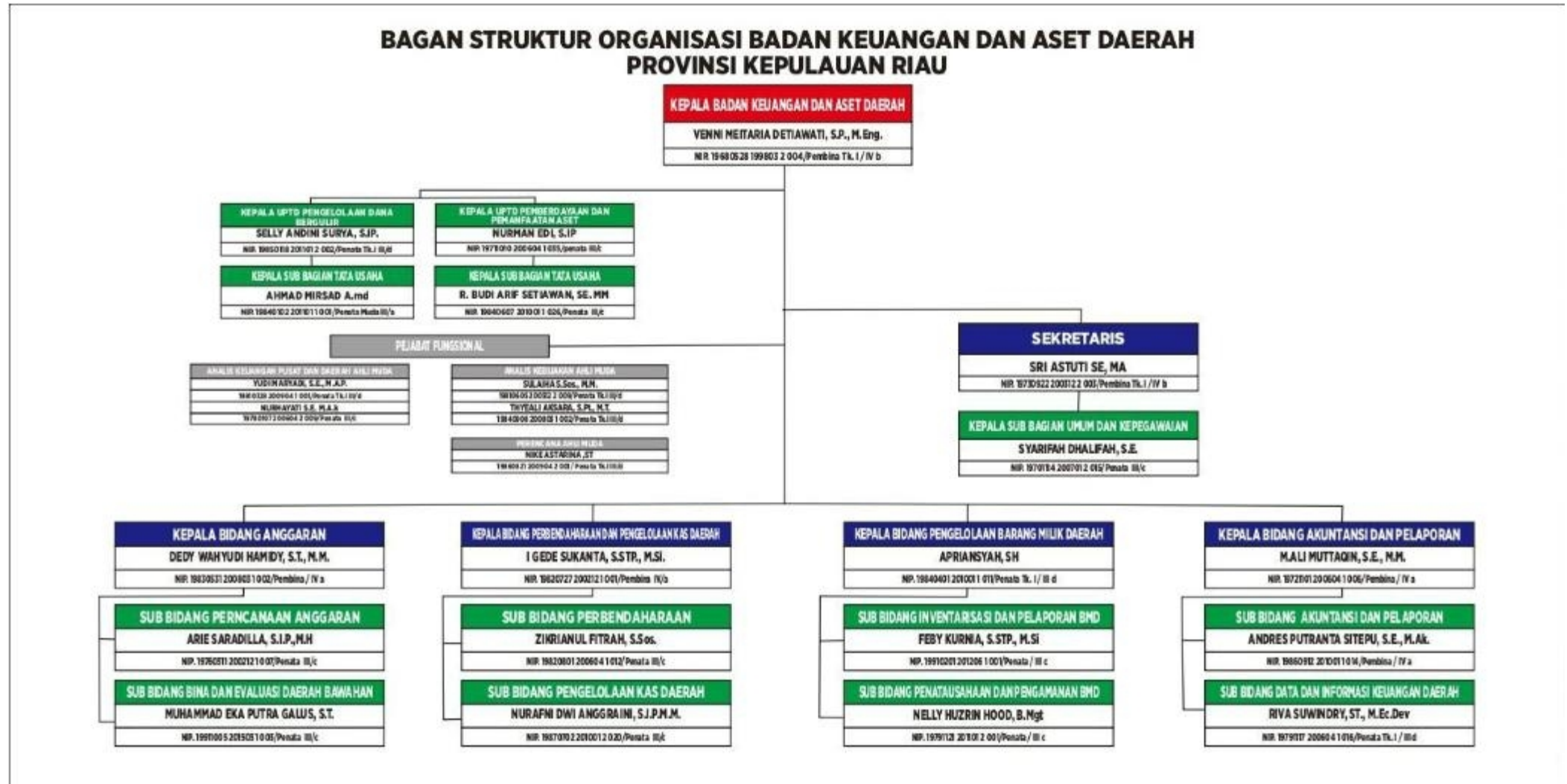
Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah Badan Daerah tipe A, dan terbentuk dengan dasar Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas pokok dari Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Rincian kedudukan dan struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah. Struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah seperti yang termuat dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat;
2. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
3. Bidang Anggaran;
4. Sub Bidang Bina dan Evaluasi Daerah Bawahan;
5. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
6. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah;
7. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
8. Sub Bidang Perbendaharaan;
9. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
10. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
11. Sub Bidang Data dan Informasi Keuangan Daerah;
12. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
14. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
16. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

**Gambar I-1**  
**Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau**



## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi sebagai berikut

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akutansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi

6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

#### **1. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan bidang-bidang Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan, dan Umum dan Kepegawaian.
- b. Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- c. Penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
- d. Penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- e. Penyiapan bahan laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Perangkat Daerah;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja Perangkat Daerah;
- g. Pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Perangkat

Daerah;

- h. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja;
- i. Penyiapan bahan-bahan untuk rapat koordinasi musyawarah Penyiapan bahan-bahan untuk rapat koordinasi musyawarah;
- j. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- k. Pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- l. Penyiapan bahan pelaporan keuangan Perangkat Daerah;
- m. Penghimpunan dan menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- n. Penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan;
- o. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pertanggungjawaban pembukuan;
- p. Pelaksanaan proses usulan pengangkatan atau pemberhentian bendaharaan di lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- q. Penyiapan dan menyusun laporan pertanggungjawaban, melaksanakan Penyiapan dan menyusun laporan pertanggungjawaban, melaksanakan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- r. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah;
- s. Penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- t. Penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat terdiri atas Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian.

## **2. Bidang Anggaran**

Bidang Anggaran mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Anggaran serta Bina dan Evaluasi Daerah Bawahan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi

- a. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Anggaran serta Bina dan Evaluasi Daerah Bawahan.
- b. Pelaksanaan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan.
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD.
- d. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD;
- e. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang teknis penyusunan anggaran SKPD
- f. Pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan, anggaran belanja daerah dan anggaran pembiayaan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Anggaran terdiri atas Sub Bidang Perencanaan Anggaran, dan Sub Bidang Bina dan Evaluasi Daerah Bawahan

## **3. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah;**

Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perbendaharaan dan Pengelola Kas Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perbendaharaan dan Pengelola Kas Daerah
- b. Pelaksanaan pengadaan pengujian kebenaran dan kelengkapan Dokumen terhadap surat perintah membayar (SPM) sebagai dasar pembuatan surat perintah pencairan dana (SP2D) di lingkup Perbendaharaan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran BLUD;
- c. Penerbitan SP2D sebagai dasar pencairan dana serta daftar pengujinya untuk semua beban pengeluaran yang bersifat langsung (LS), Uang persediaan (UP), ganti uang (GU) dan tambah uang (TU) untuk keperluan dinas, badan, kantor, bagian/perangkat pemerintah daerah di lingkup Perbendaharaan;
- d. Penerbitan SP2D Non Anggaran sebagai bukti penyeteroran pajak;
- e. Pencatatan dan membukukan pengeluaran SP2D dalam bentuk register SP2D dan mengarsipkannya dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perbendaharaan;
- f. Pemberian rekomendasi serta menyiapkan surat keputusan dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian serta pengembangan tugas dan kewajiban bendahara pengeluaran
- g. Pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah terdiri atas Sub Bidang Perbendaharaan, dan Sub Bidang Pengelola Kas Daerah.

#### **4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;**

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas memimpin, menkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Akuntansi dan Pelaporan serta Data dan Informasi Keuangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Bidang



Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Akuntansi dan Pelaporan serta Data dan Informasi Keuangan Daerah.
- b. Penyusunan bahan kebijakan, sistem prosedur dan panduan teknis pelaksanaan akuntansi keuangan daerah untuk SKPD pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
- c. Pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
- d. Penghimpunan Laporan Realisasi Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan dan prognosis semester kedua dari SKPD pada Lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
- e. Pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan secara periodik sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan terhadap laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
- f. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Terhadap Pelaksanaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban BLUD Provinsi dan kabupaten/kota;
- g. Penyusunan dan menyajikan laporan keuangan konsolidasi dari SKPD pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
- h. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- i. Pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
- j. Pelaksanaan jurnal koreksi kesalahan pembukuan dan penyesuaian terhadap pendapatan, belanja dan non kas dalam rangka Penyusunan laporan keuangan semesteran dan transaksi akhir tahun dari SKPD pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
- k. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai kebijakan akuntansi pemerintahan daerah pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Sub Bidang Data dan Informasi Keuangan Daerah.

## **5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;**

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas memimpin mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pengelolaan barang bidang daerah;
- b. Penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. Penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- d. Penelitian usulan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
  - e. Pengumpulan, analisis, dan penyiapan data untuk menentukan analisis standar biaya kegiatan dan menyusun standar barang, standar kebutuhan dan standar satuan harga Provinsi;
  - f. Penyiapan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
  - g. Penelitian dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah;
  - h. Penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
  - i. Penyiapan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah;
  - j. Pembinaan pengelolaan barang milik daerah kabupaten/kota; dan
  - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri atas Sub Bidang Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah, dan Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah

## **6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset**

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas pokok memberdayakan dan memanfaatkan aset daerah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan untuk menambah pendapatan asli daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Pemberdayaan dan Pemanfaatan melaksanakan fungsi :

- a. melakukan pendataan aset yang tidak digunakan untuk operasional;

- b. menawarkan kerja sama pemanfaatan aset kepada pihak ke 3 atas aset yang tidak digunakan untuk operasional;
- c. melakukan kerjasama dengan pihak ke 3 atas pemanfaatan aset bergerak maupun aset tidak bergerak
- d. mengkaji dan menentukan kompensasi atas pemanfaatan aset bergerak dan tidak bergerak
- e. mengeluarkan izin atas pemanfaatan aset bergerak maupun aset tidak bergerak;
- f. menyusun program kerja dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset;
- g. membuat rencana bisnis sesuai dengan jenis aset; dan
- h. melaporkan hasil dan program kerja dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset.

## **7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir**

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan badan untuk melaksanakan pengelolaan dana bergulir, pengkajian dan pengembalian serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut UPT Pengelola Dana Bergulir melaksanakan fungsi:

- a. menyusun bahan perencanaan operasional di lingkungan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir;
- c. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir;
- d. menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait ketatausahaan;
- e. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- f. menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait pemberdayaan Aset;
- g. Menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait pengelolaan dana bergulir;

## **8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing- masing.

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS**

#### **A. Visi dan Misi**

Visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk lima tahun yang akan datang dan juga untuk mengidentifikasi keterkaitannya dengan faktor pendukung (penghambat dan pendorong) pelayanan, Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah tersebut.

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. **Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau periode 2025-2029 adalah "Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata" .**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, misi yang ditempuh sebanyak 5 (lima) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah.
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah.
3. Menguwudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Bedaya Saing dan Berkarakter.
4. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, dan Berbasis Teknologi Informasi Berorientasi Pelayanan;
5. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau mengarah pada pencapaian unsur misi ke-4 yaitu Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, dan Berbasis Teknologi Informasi Berorientasi Pelayanan dan sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keunagan Daerah, dan Kualitas Pengawasan serta Daya Saing Daerah.

## B. Tujuan dan Sasaran

### 1. Tujuan

Tujuan dan sasaran pada hakikatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2025-2029.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dengan kata lain tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel.**

### 2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound and continuously improve (SMART-C)*.

Rumusan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel II.1 sebagaimana berikut ini:

**Tabel II-1**  
**Target Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset**  
**DaerahProvinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2025-2029**

| NSPK/Sasaran RPJMD                                                                                                                                                                                                                                             | Tujuan                                                                         | Sasaran                                                                                                            | Indikator Tujuan/ Sasaran                                                          | Satuan       | Kondisi Awal | Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun |            |            |            |            |            | Kondisi Akhir Periode Renstra |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                    |              | 2024         | 2025                                 | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |                               |
| <b>NSPK:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan keuangan</li> <li>Pengelolaan BMD</li> </ul> <b>Sasaran RPJMD:</b> Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah, dan kualitas pengawasan serta Daya Saing Daerah | Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel |                                                                                                                    | <b>Opini BPK atas Laporan Keuangan</b>                                             | <b>Opini</b> | <b>WTP</b>   | <b>WTP</b>                           | <b>WTP</b> | <b>WTP</b> | <b>WTP</b> | <b>WTP</b> | <b>WTP</b> | <b>WTP</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi | Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundang-undangan | %            | N/A          | 100                                  | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                    | Indeks Pengelolaan Barang Milk Daerah (IPA)                                        | Indeks       | 2.62         | 2.63                                 | 2.64       | 3          | 3          | 3          | 3          | 3                             |

Sumber: Renstra Perubahan BKAD Provinsi Kepulauan Riau, 2025-2029

### **BAB III**

#### **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

##### **A. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026**

Rencana Kinerja Tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan dalam rangka mencapai target dan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

##### **B. Sasaran Strategis**

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan BKAD Provinsi Kepulauan Riau tersebut, pada Tahun 2026 telah ditentukan sasaran dan indikator sasaran strategis sebagai berikut

- 1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan indikator sasaran
  - a. Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundang-undangan dengan target sebesar 100%.
  - b. Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPA) dengan target sebesar 2,64.



Tabel III-1  
Rencana Kinerja Tahunan 2026

| No | Sasaran Strategis                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                  | Target |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi | Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundang-undangan | 100%   |
|    |                                                                                                                    | Indeks Pengelolaan Barang Milk Daerah (IPA)                                        | 2,64   |

Sementara dengan keterkaitan antara sasaran, program dan indikator program jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau disajikan dalam Tabel III.2 sebagaimana berikut :

Tabel III-2

Program, Sub Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

| PROGRAM                                           | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                    | TARGET KINERJA |         |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
|                                                   |              |                                                                                                                                 |                                                                                                              | JUMLAH         | SATUAN  |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN                      |              |                                                                                                                                 |                                                                                                              |                |         |
| Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 1.           | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                          | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun                                                                     | 2              | Dokumen |
|                                                   | 2.           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun                                                 | 2              | Dokumen |
|                                                   | 3.           | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                                  | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                            | 43             | Dokumen |
|                                                   | 4.           | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                        | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                  | 43             | Dokumen |
|                                                   | 5.           | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | 2              | Dokumen |
|                                                   | 6.           | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2              | Dokumen |
|                                                   | 7.           | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                      | 2              | Dokumen |
|                                                   | 8.           | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                              | 4              | Dokumen |
|                                                   | 9.           | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                          | 4              | Dokumen |

|                                                      |     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |    |         |
|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|                                                      | 10. | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                                                                                      | 4  | Dokumen |
|                                                      | 11. | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                                                                                                                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                                                                                                                            | 40 | Orang   |
| Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | 1.  | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota                                                   | 7  | Laporan |
|                                                      | 2.  | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                                | 7  | Laporan |
|                                                      | 3.  | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota | 7  | Laporan |
|                                                      | 4.  | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi                                                                                                                                                                    | 7  | Dokumen |
|                                                      | 5.  | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan                                                                                                                                                            | 1  | Laporan |
|                                                      | 6.  | Pembinaan Implementasi Sistem Informasi                                                                                                                                                                    | Orang yang mengikuti Pembinaan                                                                                                                                                                                       | 40 | Orang   |

|                                                  |    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |     |         |
|--------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|                                                  |    | Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                     | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                          |     |         |
| Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 1. | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                       | 4   | Dokumen |
|                                                  | 2. | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                             | 4   | Dokumen |
|                                                  | 3. | Koordinasi, fasilitasi, asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 4   | Dokumen |
|                                                  | 4. | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank          | 4   | Dokumen |
|                                                  | 5. | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait                                            | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                          | 4   | Dokumen |
|                                                  | 6. | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan        | 1   | Dokumen |
|                                                  | 7. | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                           | 100 | Orang   |

|                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah | 1  | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                  | 4 | Laporan |
|                                                                             | 2  | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban                                                                                                 | Jumlah Dokume Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                          | 4 | Dokumen |
|                                                                             | 3. | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (UPT DANA BERGULIR)                                                                             | Jumlah Dokume Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (UPT DANA BERGULIR)                                      | 4 | Dokumen |
|                                                                             | 4. | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi                                                                                                 | 1 | Laporan |
|                                                                             | 5. | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Provinsi Pelaksanaan APBD | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | 2 | Dokumen |
|                                                                             | 6. | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                            | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                     | 1 | Dokumen |
|                                                                             | 7. | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                         | 1 | Dokumen |
|                                                                             | 8. | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                               | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                | 1 | Dokumen |

|                                                                                              |     |                                                                                                    |                                                                                                                     |     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|                                                                                              | 9.  | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi               | 95  | Orang   |
|                                                                                              | 10. | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi                                                       | Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina                                                                                    | 21  | Lembaga |
| Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                      | 1.  | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah                  | 1   | Laporan |
|                                                                                              | 2.  | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (UPT Dana Bergulir)        | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (UPT Dana Bergulir)                         | 4   | Laporan |
|                                                                                              | 3.  | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                               | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                | 1   | Laporan |
|                                                                                              | 4.  | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                              | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                               | 4   | Laporan |
|                                                                                              | 5.  | Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi                                                               | Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi                                                                                | 4   | Laporan |
| Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 1   | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah            | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah        | 1   | Dokumen |
|                                                                                              | 2   | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi            | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi | 129 | Orang   |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                                               |     |                                                                                                    |                                                                                                                     |     |         |
| Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              | 1.  | Penyusunan Standar Harga                                                                           | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                   | 1   | Dokumen |
|                                                                                              | 2.  | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                        | 1   | Dokumen |

|                                                                  |     |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |   |         |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
|                                                                  | 3.  | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                    | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                | 1 | Dokumen |
|                                                                  | 4.  | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                                                | 4 | Laporan |
|                                                                  | 5.  | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                                                                    | 1 | Laporan |
|                                                                  | 6.  | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                             | 4 | Laporan |
|                                                                  | 7.  | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah                                           | 1 | Laporan |
|                                                                  | 8.  | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah                    | 1 | Dokumen |
|                                                                  | 9.  | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                           | 4 | Laporan |
|                                                                  | 10. | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                                                 | 1 | Laporan |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>     |     |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |   |         |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                     | 2 | Dokumen |
|                                                                  | 2.  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                | 1 | Dokumen |
|                                                                  | 3.  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar | 1 | Laporan |

|                                           |    |                                                                                          |                                                                                                                                                     |     |             |
|-------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
|                                           |    |                                                                                          | Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                              |     |             |
|                                           | 4. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                    | 4   | Laporan     |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 218 | Orang/Bulan |
|                                           | 2. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                  | 4   | Dokumen     |
|                                           | 3. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD            | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 4   | Dokumen     |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1. | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                            | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                 | 6   | Orang       |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 1. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                  | 1   | Paket       |
|                                           | 2. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PEMBERDAYAAN ASET) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                  | 1   | Paket       |
|                                           | 3. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                      | 4   | Paket       |
|                                           | 4. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PEMBERDAYAAN ASET)                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                      | 2   | Paket       |
|                                           | 5. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                  | 2   | Paket       |
|                                           | 6. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PEMBERDAYAAN ASET)                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                  | 1   | Paket       |
|                                           | 7. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan                                                                                                                       | 4   | Paket       |



|                                                                  |     |                                                                                 |                                                                                                |    |         |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|                                                                  |     |                                                                                 | .Penggandaan yang Disediakan                                                                   |    |         |
|                                                                  | 8.  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT PEMBERDAYAAN ASET)                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      | 1  | Paket   |
|                                                                  | 9.  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan                   | 1  | Dokumen |
|                                                                  | 10. | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                       | 4  | Laporan |
|                                                                  | 11. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 4  | Laporan |
|                                                                  | 12. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT DANA BERGULIR)        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 4  | Laporan |
|                                                                  | 13. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PEMBERDAYAAN ASET)    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 4  | Laporan |
|                                                                  | 14. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | 4  | Dokumen |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 27 | Unit    |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 1.  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lainnya yang Disediakan | 4  | Laporan |
|                                                                  | 2.  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PEMBERDAYAAN ASET) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lainnya yang Disediakan | 4  | Laporan |
|                                                                  | 3.  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya yang Disediakan       | 4  | Laporan |
|                                                                  | 4.  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Lainnya yang Disediakan                   | 4  | Laporan |

|                                                                       |    |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|                                                                       | 5. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PEMBERDAYAAN ASET)                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Lainnya yang Disediakan                                                            | 4  | Laporan |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya                                  | 2  | Unit    |
|                                                                       | 2. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan atau Lapangan yang dipelihara dan dibayrkan Pajak dan Perizinannya | 37 | Unit    |
|                                                                       | 3. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                                                      | 80 | Unit    |
|                                                                       | 4. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PEMBERDAYAAN ASET)                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                                                      | 27 | Unit    |
|                                                                       | 5. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                                                | 1  | Unit    |
|                                                                       | 6. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPT PEMBERDAYAAN ASET)                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                                                | 1  | Unit    |
|                                                                       | 7. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT PEMBERDAYAAN ASET)         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                          | 1  | Unit    |

Sumber: Renstra dan Renja BKAD Provinsi Kepulauan Riau, 2026

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 ini merupakan komitmen BKAD Provinsi Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKAD Provinsi Kepulauan Riau merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam merencanakan pembangunan daerah khususnya di lingkungan BKAD Provinsi Kepulauan Riau. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisien yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKAD Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2026.



Pemerintah  
Provinsi Kepulauan Riau

# RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2026

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU